

**ANALISIS KINERJA STANDAR PELAYANAN  
MINIMUMPENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2011-2013: Pendekatan *Stochastic Frontier Analysis***

**(SFA)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**CANTIKA**  
**NIM. 12020111140077**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2016**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Cantika

Nomor Induk Mahasiswa : 12020111140077

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA STANDAR PELAYANAN  
MINIMUM PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN 2011-2013: Pendekatan  
Stochastic Frontier Analysis (SFA)**

Dosen Pembimbing : Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D.

Semarang, 16 Februari 2016  
Dosen Pembimbing

Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D  
NIP. 197306101998021001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Cantika

Nomor Induk Mahasiswa : 12020111140077

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJASTANDAR PELAYANAN**

**MINIMUM PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA**

**TENGAH TAHUN 2011-2013 : Pendekatan *Stochastic***

***Frontier Analysis (SFA)***

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 Maret 2016**

### **Tim Penguji:**

1. Akhmad Syakir Kurnia, S. E., M. Si., Ph. D. (.....)

2. Wahyu Widodo, S. E., M. Si., Ph. D. (.....)

3. Evi Yulia Purwanti, S. E., M. Si. (.....)

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cantika

NIM : 12020111140077

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013: Pendekatan *Stochastic Frontier Analysis***” adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Saya mengakui bahwa skripsi ini dapat dihasilkan berkat bimbingan dan dukungan penuh dari dosen pembimbing saya, yaitu Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M. Si., Ph. D. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 17Februari 2016

Yang Membuat Pernyataan,

Cantika

NIM. 12020111140077

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Whether you think you’re ready or not, just start right now. There is magic in action”

“Better you regret doing the unsuitable thing, than regret doing nothing”

“there is no limit of struggling”

“succes is not a coincidence but is an option”

“do what is right, not what is easy”

### PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada  
Mamah, Keluarga Besar Dan Semua Orang Yang Kusayangi*

## ***ABSTRACT***

One of the goals of the MDGs on improving the quality of human resources throughout the world, namely improving the quality of education. Indonesia's efforts to improve the quality of education through the Universal Secondary Program or compulsory 12 years. The purpose of this study is to analyze the success of the performance of the Minimum Service Standards of education to achieve the maximum level of education indicators in Central Java province in 2011-2013. The method used is the method of Stochastic Frontier Analysis (SFA) with the production function to measure the efficiency of 35 regencies / cities in Central Java. The measurement results SFA method that appears is in the form of a score of 0-1. The closer to 1, the more efficient the Regency / the City. Input variable in this study is the ratio of teacher / pupil, teacher / school, the ratio of the number of schools to the number of population aged 16-18 years and a variable output of GER, Enrollment, and Score Average Length School. The results of the analysis using the SFA show that during the period 2011-2013 each District / City have efficiency rate ranges from 80-100%, indicating a high efficiency, although not yet reached full efficiency or 1. From the results of testing hypotheses about the effect of the input variables to the output variable APK, APM and RLS annually have a significant effect. On the input indicators teacher / school and school / SM-age population has a positive effect on output indicators. Whereas, for the variable teacher / student always has a negative effect in influencing the increase and decrease output.

Keywords : Efficiency, Education Indicators, minimum service standards, SFA.

## ABSTRAKSI

Salah satu tujuan MDGs tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia diseluruh dunia yaitu peningkatan mutu pendidikan. Upaya Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui Program Menengah Universal atau wajib belajar 12 tahun. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis keberhasilan kinerja Standar Pelayanan Minimum pendidikan untuk mencapai tingkat indikator pendidikan yang maksimal di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) dengan fungsi produksi guna mengukur efisiensi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil pengukuran metode SFA yang muncul adalah dalam bentuk skor antara 0-1. Semakin mendekati 1 maka semakin efisien Kabupaten/Kota tersebut. Variabel input dalam penelitian ini adalah rasio guru/murid, guru/sekolah, rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan variabel output berupa Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Hasil analisis menggunakan metode SFA menunjukkan bahwa selama periode 2011-2013 setiap Kabupaten/Kota mempunyai tingkat efisiensi berkisar 80-100%, menunjukkan tingginya efisiensi walaupun belum mencapai efisiensi penuh atau 1. Dari hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel input terhadap variabel output APK, APM, dan RLS setiap tahunnya memiliki pengaruh yang signifikan. Pada indikator input guru/sekolah dan sekolah/penduduk usia SM memiliki pengaruh yang positif terhadap indikator output. Sedangkan, untuk variabel guru/murid selalu memiliki pengaruh yang negatif dalam mempengaruhi peningkatan dan penurunan output.

Kata kunci : Efisiensi, Indikator Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal,SFA.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Standar Pelayanan Minimum Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013: Pendekatan *Stochastic Frontier Analysis* (SFA)” Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata S1 Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Mamah, Bapak dan Abang Tersayang, untaian doa, motivasi, dan semangat yang tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terimakasih atas semua yang telah engkau berikan.
2. Aditomo Priyo Prakoso tersayang, atas untaian doa, motivasi dan waktu yang selalu disematkan untuk selalu mendukung penulis dalam usaha penyusunan skripsi selama ini.
3. Bapak Dr. Suharnomo Kaslan, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E. M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, masukan-masukan, dan saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bu Evi Yulia Purwanti, S.E., M. Si selaku dosen wali yang banyak memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi selama penulis menjalani studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP.



6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Para sahabat Rara, Marlina, Topik, Chandra, David, Acil. Terimakasih atas bantuan, dukungan, canda dan tawa selama kuliah di FEB UNDIP.
8. Sahabat dan Teman terbaik IESP 2011: Hami Furqon, Fajar Setiawan, Ari Wahyu Nugroho, Lois Lasyana Narwastu, Afrina, Savira Maghfiratul Fadhilah, Mustaha Akhyar, Nur Fahmi Rofiq, Hendrik Widiyanto, Ichwinsyah Azali, Rify Fazrina Djuuna, Joseph Rangga Fergidan yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas diskusi yang hangat selama penulis menjalani studi di FEB Undip.
9. Nararyani Pramuditha, Nadila Jati, Ajeng Megaputri, Nabil, Bella, Laras, Alya seluruh sahabat yang selalu mendukung. Terimakasih atas bantuan dan motivasi selama penulis menempa ilmu ditingkat pendidikan tinggi.
10. Teman-teman seperjuangan HMJ IESP periode 2012-2013. Terima kasih atas kerjasama, pengalaman, bersedia direpotkan. Sukses untuk kalian.
11. Teman-teman KKN Tim I 2015 Desa Bae, Kecamatan Bae - Kudus: Semoga kedepannya tetap kompak dan sukses bersama.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. Oleh karenanya, penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik untuk skripsi ini.

Semarang, 17 Februari 2016

Penulis,

Cantika

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	17
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 Investasi Manusia.....	17
2.1.2 Definisi dan Indikator Pendidikan.....	20
2.1.2.1 Indikator Pendidikan .....	22

2.1.3 Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan .....	27
2.1.4 Konsep dan Kebijakan Pendidikan Menengah Universal .....	28
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan .....	31
2.1.6 Peran Pemerintah Terhadap PMU .....	33
2.1.6.1 Peran Pemerintah Pusat Terhadap PMU.....	34
2.1.6.2 Peran Pemerintah Provinsi Terhadap PMU.....	34
2.1.7 Teori Produksi .....	35
2.1.7.1 Fungsi Produksi.....	36
2.1.7.2 Return To Scale .....	37
2.1.8 Definisi Efisiensi .....	38
2.1.8.1 Efisiensi Teknis .....	39
2.2 Penelitian Terdahulu.....	42
2.3 Kerangka Pemikiran .....	43
2.4 Hipotesis .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
3.1 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian .....	47
3.1.1 Variabel Penelitian.....	47
3.1.2 Definisi Operasional .....	48
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	50
3.3 Stochastic Frontier Analysis .....	51
3.3.1 Estimasi Parametrik.....	54
3.4 Metode Analisis.....	55
3.4.1 Model <i>Single Equation</i> .....	56
3.4.2 Uji t-statistik.....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	58
4.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Jawa Tengah	58
4.1.2 Keadaan Sosial Ekonomi .....	58
4.1.2 Kondisi Demografi Provinsi Jawa Tengah .....	58

4.2 Analisis Data .....	65
4.2.2 Analisis Parametrik .....	65
BABV PENUTUP.....	79
5.1 Simpulan .....	79
5.2 Keterbatasan .....	80
5.3 Saran .....	80
5.3.1 Implikasi Kebijakan .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah .....	6
Tabel 1.2 Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2011-2013.....	8
Tabel 1.3 Persentase Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 .....	9
Tabel 1.4 Persentase Ketersediaan Fasilitas Milik SMK Tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah .....	10
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Parameter Fungsi Indikator Output Angka Partisipasi Kasar Periode 2011-2013.....	66
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Parameter Fungsi Indikator Output Angka Partisipasi Murni Periode 2011-2013.....	67
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Parameter Fungsi Indikator Output Angka Rata-rata Lama Sekolah Periode 2011-2013.....	68
Tabel 4.4 Tingkat Efisiensi SPM Dengan Indikator Output APK Pada Tingkat SM di Jawa Tengah Tahun 2011-2013.....	70
Tabel 4.5 Statistika Deskriptif Nilai Efisiensi SFA .....	72
Tabel 4.6 Tingkat Efisiensi SPM Dengan Indikator Output APM Pada Tingkat SM di Jawa Tengah Tahun 2011-2013.....	74
Tabel 4.7 Statistika Deskriptif Nilai Efisiensi SFA .....	75
Tabel 4.8 Tingkat Efisiensi SPM Dengan Indikator Output RLS Pada Tingkat SM di Jawa Tengah Tahun 2011-2013.....	76
Tabel 4.9 Statistika Deskriptif Nilai Efisiensi SFA .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Tahun Pencapaian APK di Indonesia .....	4
Gambar 1.2 Anggaran Bidang Pendidikan Jawa Tengah Tahun 2011-2013 .....	12
Gambar 2.1 Efisiensi Teknis dan Alokatif .....	41
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	45
Gambar 4.1 Peta Administratif Provinsi Jawa Tengah .....	59
Gambar 4.2 Penduduk Usia Sekolah SM Di Jawa Tengah Tahun 2011-2013 .....	60
Gambar 4.3 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Tengah Tahun 2011-2013 .....	63
Gambar 4.4 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 .....	63
Gambar 4.5 Tingkat Efisiensi SPM Terhadap APK Pada Tahun 2011-2013 .....	71
Gambar 4.6 Tingkat Efisiensi SPM Terhadap APM Pada Tahun 2011-2013 .....	73
Gambar 4.7 Tingkat Efisiensi SPM Terhadap RLS Pada Tahun 2011-2013 .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor pendorong dalam proses pembangunan suatu negara. Penduduk berperan sebagai penggerak dan pengembang teknologi yang mampu menghasilkan barang produksi serta jasa yang dihasilkan. Namun perkembangan jumlah penduduk tidak diikuti oleh peningkatan kualitas SDM yang pada akhirnya akan menjadi penghambat dari proses pembangunan. Rendahnya kualitas SDM akan menimbulkan beberapa masalah pembangunan seperti kemiskinan, diskriminasi, kriminalitas, kelaparan dan keterbelakangan. Maka untuk menghadapi permasalahan tersebut negara-negara di Dunia berkomitmen dan membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015.

Salah satu kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia diseluruh dunia dengan agenda utama tersedianya akses pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Saputra (2013) mengatakan bahwa MDGs 2015 mengarah pada program wajib belajar Sembilan tahun, dimana Negara harus menyediakan kesempatan yang luas bagi anak usia 7-15 tahun untuk mendapatkan pendidikan, menghadapi MDGs 2015, bidang pendidikan

di Indonesia harus berbenah diri, hal utama yang harus dilakukan adalah memperbaiki program wajib belajar dua belas tahun.

Menurut Hidayati (2013), diperkirakan oleh pemerintah tahun 2035 *working age* mencapai 70 persen dan *dependency ratio* mencapai 40 persen artinya pada tahun 2035 sekitar 7 orang produktivitas berbanding 4 orang tidak berproduktif tentu hal ini akan mampu menopang perekonomian Indonesia. Namun, apabila jumlah tersebut tidak diiringi oleh kualitas SDM maka bonus demografi akan menjadi ancaman bagi Negara. Oleh karena itu kondisi pertumbuhan penduduk yang besar harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar tujuan dari bonus demografi dapat di capai.

Kualitas SDM di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan Negara-negara lain di dunia. Kualitas SDM di Indonesia yang dirilis oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2013 menunjukkan Indonesia berada pada urutan 108 dari 187 negara di dunia. Pada 2013, nilai IPM Indonesia adalah 0,684. Angka tersebut meningkat 0,003 poin dari tahun 2012, yakni 0,681. Pada nilai 0,684, Indonesia berada dalam kategori negara dengan pembangunan manusia sedang.

Muhammad (2014), mengatakan bahwa pada tingkat ASEAN, Indonesia berada pada level di atas Myanmar, Laos, Kamboja, Timor-Leste, Vietnam dan Filipina, dan berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia serta Thailand. Beate (2014) menjelaskan, terdapat tiga dimensi utama yang digunakan sebagai dasar evaluasi IPM diantaranya: 1) hidup panjang yang sehat, 2) akses terhadap ilmu pengetahuan, 3) standard kehidupan yang layak.



Ketiga dimensi utama dapat mempengaruhi kualitas SDM di Indonesia yang masih memiliki kualitas yang rendah. Hal tersebut karena tingkat partisipasi sekolah, sesuai dengan penelitian Saputra (2013) yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi sekolah untuk pendidikan dasar baru mencapai 85 persen sampai 94 persen. Menurut Balitbang Diknas (2014) untuk SMP masih berkisar 55 persen dan SMA baru mencapai 32 persen. Maka diperlukan perancangan program yang bertahap untuk menghadapi MDGs 2015 dengan program wajib belajar dua belas tahun.

*Millenium Development Goals* menggunakan beberapa indikator dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu Negara dalam hal pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Berdasarkan Permendiknas No. 20 tahun 2003 Bab I pasal 1 menjelaskan pembangunan pada sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri sendiri serta sikap dan perilaku inovatif.

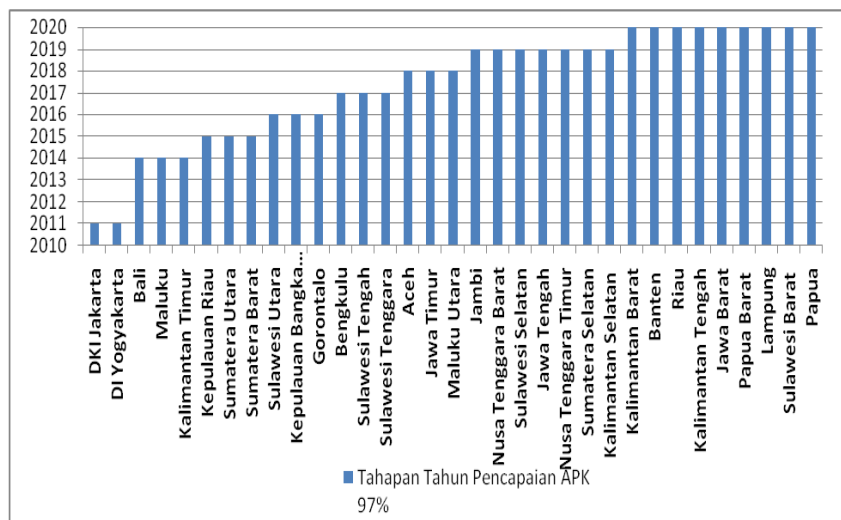
Perlunya peran pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan SDM yang berkualitas di setiap daerah adalah melalui Program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Sasaran PMU adalah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah, memperkecil disparitas antar daerah, dan memperkuat pelayanan pendidikan vokasi dengan memperbanyak SMK, maka diharapkan lulusan-lulusan di Indonesia akan memiliki SDM yang spesifik dan lebih

siap untuk bekerja. Pendidikan vokasi diarahkan kepada pendidikan menengah kejuruan sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan lulusannya memasuki dunia kerja.

Sasaran PMU adalah menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah secara signifikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah syarat mutlak agar terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, dalam hal ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM di setiap daerah.

**Gambar 1.1**

**Tahapan Tahun Pencapaian APK di Indonesia**



*Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013)*

Berdasarkan Gambar 1.1, Hayati (2013) menjelaskan bahwa pada tahun 2014 hanya terdapat 5 provinsi yang target APK telah mencapai 97 persen. Ada 71 kabupaten/kota yang saat ini rata-rata APKnya di bawah 50 persen.

Program wajib belajar memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan sampai dengan jenjang SMA dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jaminan ini diberikan tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Ini berimplikasi kepada kewajiban semua orang tua yang mempunyai anak usia SD dan SMP dan agar memberikan kesempatan sepenuhnya kepada anak-anak mereka untuk menjalani pendidikan di sekolah-sekolah sehingga minimal menamatkan SMA.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah. SPM Pendidikan ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan penganggaran target masing-masing daerah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis perencanaan yang berlaku.

Standar Nasional Pendidikan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

**Tabel 1.1**  
**Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Jawa Tengah Tahun 2011 - 2013**

	Kab/Kota	2011	2012	2013
1	Kab. Cilacap	59,35	58,70	75,99
2	Kab. Banyumas	72,28	74,23	61,31
3	Kab. Purbalingga	78,46	79,60	71,73
4	Kab. Banjarnegara	52,71	48,54	75,90
5	Kab. Kebumen	74,62	79,07	65,97
6	Kab. Purworejo	90,41	78,97	89,21
7	Kab. Wonosobo	50,16	50,41	65,93
8	Kab. Magelang	51,52	52,47	65,10
9	Kab. Boyolali	71,02	71,37	73,18
10	Kab. Klaten	78,80	84,68	80,25
11	Kab. Sukoharjo	66,24	79,61	75,48
12	Kab. Wonogiri	79,52	89,38	77,86
13	Kab. Karanganyar	53,51	62,83	76,39
14	Kab. Sragen	77,31	89,47	82,48
15	Kab. Grobogan	56,08	52,07	53,10
16	Kab. Blora	72,50	71,42	70,99
17	Kab. Rembang	53,53	50,07	57,74
18	Kab. Pati	55,19	51,75	50,98
19	Kab. Kudus	72,11	74,51	85,62
20	Kab. Jepara	39,61	51,85	73,15
21	Kab. Demak	39,51	35,04	57,69
22	Kab. Semarang	51,35	55,18	59,85
23	Kab. Temanggung	49,34	48,39	50,52
24	Kab. Kendal	61,68	73,26	56,50
25	Kab. Batang	35,48	50,03	48,49
26	Kab. Pekalongan	60,91	65,24	62,34
27	Kab. Pemasang	57,70	58,44	54,82
28	Kab. Tegal	71,91	69,92	60,90
29	Kab. Brebes	44,33	45,98	65,42
30	Kota. Magelang	108,20	122,44	115,19
31	Kota. Surakarta	108,38	119,39	124,43
32	Kota. Salatiga	105,90	124,45	126,35
33	Kota. Semarang	92,27	92,65	101,27
34	Kota. Pekalongan	71,44	81,89	93,14
35	Kota. Tegal	89,43	93,15	106,23
	Jawa Tengah	67,22	71,04	73,05

Sumber : Profil Pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Tengah (2015)

Berdasarkan Tabel 1.1 nilai APK antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat nilai yang bervariasi. Pada tahun 2011 ada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang melebihi APK Jawa Tengah atau sebesar 48,57 persen dari jumlah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011 terdapat tiga Kabupaten/Kota yang sudah mencapai APK 97 persen.

Pada tahun 2012 terdapat 17 Kabupaten/Kota yang APK nya melebihi APK Provinsi Jawa Tengah atau sebesar 48,57 persen dari jumlah Kabupaten/Kota, dimana APK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 71,04 persen. Pada tahun 2012 juga terdapat tiga Kota yang telah melebihi target APK SM yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Salatiga.

Pada tahun 2013 terdapat 14 Kabupaten/Kota yang APK nya melebihi APK Provinsi Jawa Tengah atau sebesar 40,00 persen dari jumlah Kabupaten/Kota, dimana APK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 73,05 persen. Apabila dilihat berdasarkan Tabel 1.1 terjadi peningkatan pada tahun 2012 ke tahun 2013 khususnya APK Provinsi Jawa Tengah, hal ini menyebabkan meningkatnya pula tingkat rata-rata APK yang menyebabkan penurunan jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki APK lebih besar dari APK Provinsi, dari 35 Kabupaten/kota terdapat 17 Kabupaten/Kota pada tahun 2011 kemudian masih 17 Kabupaten/ Kota di tahun 2012 dan terjadi penurunan pada tahun 2013 hanya terdapat 15 Kabupaten/Kota yang APK nya lebih dari APK Provinsi Jawa Tengah.

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.2. Hal ini dapat dilihat oleh besarnya IPM Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2011-2013**

No	Kabupaten/Kota	IPM 2011	IPM 2012	IPM 2013
1	Kab. Cilacap	72,34	72,77	73,34
2	Kab. Banyumas	72,96	73,33	73,96
3	Kab. Purbalingga	72,50	72,97	73,49
4	Kab. Banjarnegara	70,39	70,70	71,13
5	Kab. Kebumen	71,62	71,86	72,25
6	Kab. Purworejo	72,91	73,53	74,18
7	Kab. Wonosobo	71,06	71,45	71,90
8	Kab. Magelang	72,69	73,14	73,67
9	Kab. Boyolali	71,25	71,50	71,88
10	Kab. Klaten	74,10	74,46	74,91
11	Kab. Sukoharjo	73,97	74,21	74,91
12	Kab. Wonogiri	71,86	72,59	73,09
13	Kab. Karanganyar	73,82	74,62	75,27
14	Kab. Sragen	71,33	71,85	72,31
15	Kab. Grobogan	71,27	71,77	72,37
16	Kab. Blora	71,25	71,49	72,10
17	Kab. Rembang	72,45	72,81	73,53
18	Kab. Pati	73,49	73,81	74,58
19	Kab. Kudus	73,24	73,69	74,09
20	Kab. Jepara	73,12	73,54	74,13
21	Kab. Demak	73,09	73,52	73,85
22	Kab. Semarang	74,45	74,98	75,48
23	Kab. Temanggung	74,47	74,74	75,00
24	Kab. Kendal	70,85	71,48	72,03
25	Kab. Batang	71,06	71,41	72,03
26	Kab. Pekalongan	71,86	72,37	73,14
27	Kab. Pemasang	70,22	70,66	71,26
28	Kab. Tegal	71,09	71,74	72,22
29	Kab. Brebes	68,61	69,37	69,85
30	Kota Magelang	76,83	77,26	77,91
31	Kota Surakarta	78,18	78,60	79,10
32	Kota Salatiga	76,83	77,13	77,54
33	Kota Semarang	77,42	77,98	78,54
34	Kota Pekalongan	74,90	75,25	75,75
35	Kota Tegal	74,20	74,63	75,02
<b>36</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>72,91</b>	<b>73,35</b>	<b>74,05</b>

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Jateng, 2014.*

Pada gambar 1.2 besaran IPM di Provinsi Jawa Tengahselalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 nilai IPM Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 72,91 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 73,35 persen. Kemudian terjadi peningkatan menjadi 74,05 persen pada tahun 2013. Pencapaian IPM Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2013 disebabkan oleh program Pendidikan Menengah Universal yang dicanangkan oleh Presiden pada tahun 2013 lalu. Peningkatan mutu pendidikan menjadi tujuan utama program tersebut.

**Tabel 1.3**  
**Persentase Penduduk Usia Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013**

<b>Jenjang Pendidikan Tahun</b>	<b>SD Umur 7-12</b>	<b>SMP Umur 13-15</b>	<b>SMA Umur 16-18</b>	<b>Universitas Umur 19-24</b>
2011	32,97	16,44	16,18	34,42
2012	31,80	15,87	15,88	36,44
2013	30,88	13,72	15,77	39,62

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, BPS Jateng 2013,diolah

Dari Tabel 1.3 kita dapat melihat Persentase Penduduk Usia Sekolah Usia 19-24 tahun di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2011 – 2013 terus mengalami peningkatan. Kondisi berbeda ditunjukkan oleh tingkat Penduduk Usia Sekolah di Usia 7-12, Usia 13-15 dan Usia 16-18 tahun yang mengalami penurunan. Pada jenjang pendidikan menengah yaitu pada usia 16-18 tahun, penduduk usia sekolah di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dalam hal persentase terhadap penduduk usia sekolah semua jenjang. Ini tidak berarti bahwa jumlah Penduduk Usia Sekolah

Jenjang Menengah mengalami penurunan, namun bisa terjadi proporsi jumlah murid pada jenjang pendidikan lain yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Sasaran lain dari PMU yang akan dicapai adalah peningkatan pelayanan vokasi. Pelayanan vokasi meliputi peningkatan kualitas pelayanan keadaan fisik (bangunan) dan non fisik (system). Adapun peningkatan pelayanan nya antara lain meningkatkan ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga, buku pelajaran, guru yang tersedia, guru yang layak mengajar sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Ketersediaan fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan juga merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam upaya menunjang penyelenggaraan pendidikan vokasi di suatu wilayah. Dari Tabel 1.4 akan menampilkan jumlah ketersediaan fasilitas SMK, jumlah murid dan jumlah guru antara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 1.4**  
**Persentase Ketersediaan Fasilitas Milik SMKTahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah**

No	Fasilitas	Jumlah (persen)
1	Perpustakaan	83,15
2	Lap. OR	4,49
3	UKS	73,03
4	Laboratorium	244,94
5	Keterampilan	13,48
6	BP	86,52
7	Serba-guna	47,19
8	Bengkel	25,84
9	Ruang Praktik	244,94

*Sumber: Dikdasmen, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2014, diolah*

Berdasarkan Tabel 1.4, fasilitas yang tersedia di Provinsi Jawa Tengah khususnya milik SMK dapat dilihat masih ada beberapa fasilitas yang belum



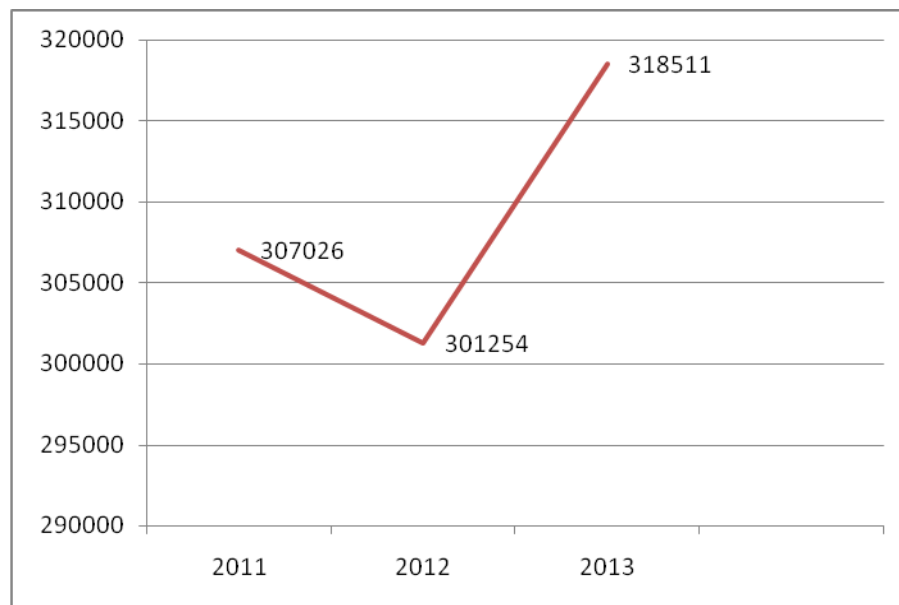
memadai. Seperti halnya lapangan olah raga, hanya terdapat 4,49 persen sekolah SMK yang memiliki lapangan olah raga. Masih banyak sekolah SMK yang menggunakan lapangan umum sebagai lapangan olah raga mereka. Di samping itu fasilitas bengkel juga masih kurang, yaitu hanya 25,84 persen yang memiliki fasilitas bengkel. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh fasilitas Laboratorium dan Ruang praktik ternyata seluruh SMK di Semarang sudah memiliki dan bahkan mencapai lebih dari 200 persen.

Pendidikan yang bermutu merupakan landasan yang kokoh untuk memperkuat pengembangan mutu SDM di jenjang pendidikan berikutnya. Program Wajib Belajar 9 tahun yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan merupakan program sektor pendidikan yang dinilai cukup sukses dalam pelaksanaannya, namun kelanjutan program menjadi wajib belajar 12 tahun juga harus dapat diwujudkan demi mencapai kualitas SDM yang lebih baik.

Disahkannya Kepmendagri no.29 tahun 2000 yang mengatur anggaran berbasis kinerja menjadi momentum penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah. Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui pengeluaran tampak dari alokasi pengeluaran belanja pemerintah daerah. Penyediaan layanan publik yang maksimal seharusnya menjadi tujuan dari dana yang dibelanjakan. Dana yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran pembangunan menjadi permasalahan penting dalam alokasi pengeluaran pemerintah daerah.

35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan dana dengan persentase terbesar untuk bidang pendidikan dari belanja pemerintah. Dapat dilihat pada Gambar 1.2 rata-rata jumlah anggaran dari tahun 2011-2014 terus mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2011-2012 sempat terjadi penurunan sebesar 5,7%. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2012-2013 sebesar 17%. Peningkatan anggaran pendidikan di Jawa Tengah berlanjut hingga tahun 2013-2014 sebesar 5,7%.

**Gambar 1.2**  
**Anggaran Bidang Pendidikan Jawa Tengah Tahun 2011-2013**



*Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan 2014, diolah*

Penggunaan anggaran ditujukan untuk menjalankan program pembangunan pendidikan melalui fasilitas dan peningkatan kualitas kinerja. Secara kuantitas, target pendidikan di Indonesia dilihat dari beberapa indikator seperti angka partisipasi

murni (APM), angka putus sekolah (APS), dan angka melanjutkan ke jenjang SMP/SMA (SMERU,2004).

Menurut Akhmad (2007), dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja pemerintah ada tiga jenis efisiensi yang penting untuk dilihat, salah satunya adalah efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah efisiensi yang menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Berkaitan dengan desentralisasi fiskal, efisiensi produksi bisa dicapai karena ada sumber daya yang dialokasikan diantara berbagai pengeluaran yang menghasilkan output paling maksimal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pemerintah fokus dalam menyiapkan SDM yang berkualitas melalui penetapan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai kelanjutan dari program wajib belajar 9 tahun yang memfokuskan untuk meningkatkan indikator pendidikan berupa presentase Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tingkat jenjang pendidikan menengah.

Berdasarkan data dari Kemendikbud, Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (APK SM) dibawah 97 persen dan tingkat Rata-Rata Lama Sekolah yang belum mencapai target 12 tahun. Kebijakan pemerintah menyelenggarakan PMU maka pemerintah optimis mampu mencapai indikator pendidikan dengan standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah berapakah besaran tingkat efisiensi Kinerja Standar Pelayanan Minimum Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah terhadap indikator pendidikan.

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun tujuan umum dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi program Standar Pelayanan Minimum Pendidikan terhadap indikator pendidikan di Jawa Tengah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kajian ilmu ekonomi. Sedangkan manfaat praktis yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan studi dan tambahan informasi dalam memahami lebih jauh mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan atau program untuk sektor pendidikan pada periode berikutnya agar tercipta pendidikan yang ideal.
3. Bagi dinas pendidikan, sebagai bahan pertimbangan dalam penyediaan pelayanan program pendidikan khususnya pendidikan menengah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan berisi latar belakang mengenai pengaruh program pendidikan universal di Provinsi Jawa Tengah menarik untuk di teliti yang dilanjutkan dengan perumusan masalah dan penjabaran tujuan, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

### 2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan Teori yang menjadi dasar penelitian, dan teori teori yang digunakan merupakan teori yang berpijak pada ekonomi pendidikan maupun bahasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

### 3. Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan variabel-variabel yang digunakan, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis *Stochastic Frontier Analysis*.

### 4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian pada Provinsi Jawa Tengah, perkembangan pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan, dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan.

### 5. BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyampaikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran bagi pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan program pendidikan menengah universal.